

PERUBAHAN MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN KOTA YOGYAKARTA 1920-1940

CHANGES IN SOCIETY AND THE DEVELOPMENT OF THE CITY OF YOGYAKARTA 1920-1940

Oleh: Farizal Farliandi Pratama, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, farizalfarliandipratama@gmail.com

Abstrak

Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Adanya dualisme pemerintahan antara Pemerintah Kolonial Belanda yang diwakili residen dengan Kasultanan Yogyakarta berperan penting terhadap perubahan masyarakat Kota Yogyakarta. Proses perubahan masyarakat Kota Yogyakarta telah mempengaruhi perkembangan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan Kota Yogyakarta baik masyarakat maupun kotanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi Kota Yogyakarta yang dinamis baik dari segi sosial, perekonomian dan pemerintahan. Proses perubahan masyarakat Kota Yogyakarta didorong oleh perkembangan penduduk, kehidupan sosial, permasalahan sosial dan gaya hidup masyarakatnya. Dampak perubahan masyarakat tersebut menyebabkan perkembangan tata kota Yogyakarta. Tata Kota Yogyakarta semakin berkembang pesat dengan dibangunnya berbagai pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah, gedung administrasi, sanitasi kota, fasilitas peribadatan, jaringan transportasi, industri dan pasar serta fasilitas hiburan dan olahraga.

Kata kunci: Perubahan,Perkembangan, Yogyakarta.

Abstrack

The city of Yogyakarta is the administrative center of the Yogyakarta Sultanate. The dualism of government between the Dutch Colonial Government represented by the residents and the Sultanate of Yogyakarta played an important role in the changes in the people of Yogyakarta City. The process of change in the city of Yogyakarta has affected the development of the city. This research aims to find out the changes in the city of Yogyakarta, both the people and the city. The results of this study indicate that the condition of the city of Yogyakarta is dynamic both in terms of social, economic and government. The process of changing the people of Yogyakarta City is driven by the development of the population, social life, social problems and lifestyle of the people. The impact of these changes in society led to the development of the city planning in Yogyakarta. The city planning of Yogyakarta is growing rapidly with the construction of various residential settlements, hospitals, schools, administrative buildings, city sanitation, worship facilities, transportation networks, industry and markets as well as entertainment and sports facilities.

Keywords: Society, City Planning, Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta dibangun di Hutan Beringan yang pada awalnya bernama Gerjiwati yang terletak diantara sungai Winongo dan sungai Code. *Babad Giyanti* mengisahkan bahwa Sultan Amangkurat telah mendirikan *Dalem* yang bernama Gerjiwati di wilayah itu. Sunan Pakubuwono II menamai wilayah itu sebagai *Ayogya*.

Kota Yogyakarta terbentuk akibat Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang dikenal dengan nama *Palihan Nagari*.¹ Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III, dan Pangeran Mangkubumi. Dalam Perjanjian Giyanti ini Kerajaan Mataram dibagi dua antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi.

Pada tahun 1757 wilayah kekuasaan Sunan Pakubuwana III dibagi menjadi dua wilayah, yaitu

Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Sementara itu, Yogyakarta juga telah terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Keempat *Vorstenlanden*² itu masing-masing dipimpin oleh penguasa *vorstenlanden* itu sendiri, yaitu Sultan, Sunan dan Adipati.

Pangeran Mangkubumi setelah dinobatkan sebagai Sultan bergelar “*Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurakhman Sayidin Panotogomo Kalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping I ing Ngayogyokarto Hadiningrat*”³ Sultan Hamengku Buwono I kemudian membangun ibukota dan keraton sebagai pusat pemerintahan.

² *Vorstenlanden* merupakan suatu istilah atau sebutan dalam bahasa Belanda untuk suatu daerah yang dikuasai oleh raja.

³ Bayu Widiatmoko, *Kronik Peralihan Nusantara Liga Raja-Raja Hingga Kolonial*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2014), hlm. 541.

¹ Sri Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. xvii.

Sultan Hamengku Buwono I dikenal sebagai ahli bangunan yang unggul sejak masih muda. Ia memimpin pembangunan Keraton Yogyakarta, menentukan bentuk dan ukurannya, serta menyelesaikannya kurang lebih satu tahun.⁴ Pembangunan keraton dimulai pada tanggal 9 Oktober 1755 setelah sebagian dari bangunan-bangunan keraton bisa ditempati, Sultan Hamengku Buwono I pindah ke keraton. Kepindahan Sultan Hamengku Buwono I dari Pesanggrahan Ambarketawang ke keraton ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1756.

Pada perkembangan selanjutnya Sultan Hamengkubuwana I dan para penerusnya mulai melakukan pengembangan-pengembangan, baik fisik maupun lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan konteks jamannya. Pada skala negara, susunan konsentris Keraton

⁴ Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 7.

Yogyakarta terwujud dalam kota yang berpusat pada *kuthagara* (keraton sebagai pusat dan *paréntah njêro*), dikelilingi *nagara* (*paréntah njaba*, para pangeran, patih, dan pejabat keraton yang lain), dan *nagaragung* (pusat kota yang besar), serta mancanagara (negara asing yang diperintah bupati).⁵

Keraton Yogyakarta disusun secara hierarkis, yakni arah utara-selatan merupakan ruang umum, resmi, dan tempat upacara, sedangkan arah timur-barat merupakan ruang pribadi, yang akrab dan keramat.⁶ Tidak lama setelah Keraton Yogyakarta dibangun, VOC diperkenankan membangun pemukiman awalnya yang pada hakekatnya adalah suatu bentuk pengawasan terhadap keraton sebagai pusat politik dan kekuasaan.

⁵ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Terjemahan Mochtar Pabotinggi, (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 26-27.

⁶ Denys Lombart, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan-warisan Kerajaan Konsentris*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, jilid 3, 2008), hlm. 113.

Sejak Sultan Hamengku Buwono I bertahta di Kasultanan Yogyakarta, pihak VOC merasa perlu mengawasi pertumbuhan Kasultanan Yogyakarta. Hal ini disebabkan Sultan Hamengku Buwono I dianggap berbahaya bagi VOC, sehingga perlu diawasi. Oleh karena itu, di Yogyakarta VOC menempatkan seorang residen. Residen pertama yang diangkat adalah Cornelis Donkel dan menjabat sebagai residen tahun 1755-1761. Cornelis Donkel dalam rangka mengawasi Sultan Hamengku Buwono I membangun benteng *Rustenburg*. Benteng *Rustenburg* disempurnakan tahun 1786 yang kemudian diganti nama menjadi benteng *Vredeburg*.

Masa penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta adalah *Zelfbestuur*.⁷ Status ini mengatur kewenangan untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri di bawah pengawasan pemerintah

penjajah status Kasultanan Yogyakarta tidak diatur dengan undang-undang, melainkan diatur dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan Sultan Hamengkubuwono I. Kedudukan Yogyakarta sebagai negara *vassal* atau negara bawahan mewajibkan untuk memenuhi kebutuhan Belanda, sesuai kontrak politik dengan Belanda. Perjanjian ini dinamakan Politik Kontrak.

Kota Yogyakarta mulai mengalami berbagai persoalan ketika mulai terjadi perubahan yang amat drastis dari kota tradisional menuju ke kota modern. Menurut Wertheim, kota-kota di Hindia Belanda salah satunya Kota Yogyakarta mengalami loncatan perubahan yang mendasar setelah tahun 1870. Liberalisasi ekonomi yang dimulai setelah diundangkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula telah meningkatkan perdagangan dan industri, memperluas administrasi sipil, dan mengakibatkan kenaikan cepat jumlah penduduk perkotaan di Jawa.⁸ Pesatnya proses modernisasi

⁷ Tuanku Luckman Sinar Basarshah *Persekutuan Adat (Adatrechts Gemeenschappen) dan Kerajaan Bumi Putera (Zelfbesturende Landschappen) di Hindia Belanda*, (Medan: Forkala, 2006), hlm. 6.

⁸ W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam*

di Kota Yogyakarta telah menjadi faktor penggerak perubahan. Berbagai perubahan yang ada baik yang berupa fisik dan non-fisik yang terjadi di Kota Yogyakarta

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah. Pengertian metode penelitian sejarah adalah yang mengacu dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau sumber sejarah.⁹ Metode penelitian sejarah terdiri dari *heuristik*, kritik sumber, *interpretasi*, dan *historiografi*. Pertama, *heuristik* merupakan langkah-langkah pengumpulan sumber. Sumber yang dikumpulkan harus memiliki informasi yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Kedua, Kritik sumber merupakan langkah-langkah untuk menentukan kebenaran informasi dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh.

Transisi: Studi Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 138.

⁹ Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 32.

Hal ini dilakukan agar kebenaran sejarah yang nantinya akan diungkap dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, *interpretasi* ini merupakan kegiatan penelitian untuk menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah melalui kritik baik intern dan ekstern. Keempat, *historiografi* atau penulisan adalah langkah terakhir dari penulisan karya sejarah. Historiografi merupakan kegiatan menyampaikan sintesis dari penelitian yang ditulis secara kronologis melalui tahap-tahap di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terbentang antara 110°24'19' sampai 110°28'53' Bujur Timur dan 07°15'24' sampai 07°49'26' Lintang Selatan. Ada tiga sungai yang membelah kota tersebut yakni Sungai Winongo yang ada di barat kota, Sungai Code terletak di tengah, dan Sungai Gajah Wong berada di sebelah timur.¹⁰ Bentuk

¹⁰ Sumintarsih & Ambar Ardianto, *Dinamika Kampung Kota Prawirotaman dalam Perspektif*

peta Kota Yogyakarta yang mirip belah ketupat¹¹ ternyata paralel dengan aliran ketiga sungai tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap pola jalur jalan raya yang ada. Berbagai jalur jalan yang ada paralel saling tegak lurus antara yang satu dengan yang lain sehingga berpengaruh terhadap pola pemukiman masyarakat di Kota Yogyakarta.

Luas wilayah Kota Yogyakarta mengalami proses perubahan sejak pendirian kota ini. Perkembangan Kota Yogyakarta secara garis besar dapat dikatakan bahwa awal kota yang hanya seluas 9,7 km² pada 1756 telah menjadi seluas 13,5 km² pada 1824. Pada 1920, Kota Yogyakarta memiliki luas 20,68 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 134.231 orang. Jumlah penduduk rata-rata per km² sebanyak 6.490,86 orang.

Sejarah dan Budaya, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB) Yogyakarta, 2014), hlm. 17.

¹¹ Tim Peneliti, *Penelitian Awal Tata Kota Yogyakarta, jilid 1* (Yogyakarta: Fakultas Teknik Arsitektur UGM & Daerah DITDJEN Tjipta Karja, 1971), hlm. 1.

Tahun 1903, wilayah Kasultanan Yogyakarta terdiri dari tiga *afdeeling*,¹² yang pertama adalah *afdeeling* Mataram dengan ibu kota berada di Kota Yogyakarta. Wilayah *afdeeling* ini terdiri dari wilayah Yogyakarta, Sleman, Kalasan, tanah-tanah susuhunan, Pasar Gede, Imogiri, dan Bantul. Kedua, *afdeeling* Kulon Progo dengan ibu kota berada di Pengasih (Wates). *Afdeeling* ini mencakup wilayah Nanggulan, Kalibawang, Sentolo dan wilayah Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman. *Afdeeling* ke tiga adalah Gunungkidul dengan ibu kota berada di Wonosari.¹³ Wilayah Gunungkidul ini merupakan distrik yang memiliki luas wilayah paling besar.

¹² *Afdeeling* adalah sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat Kabupaten.

¹³ Sukarya Watini, "Komunitas Cina di Yogyakarta Tahun 1870-1930: Tinjauan Sosial Ekonomi", Skripsi, (Yogyakarta: UNY, 2006), hlm. 25-26.

B. PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA 1920-1940

1. Penduduk

Perkembangan pemukiman kota Yogyakarta cenderung menjadi semakin plural sebagai akibat dari semakin banyaknya orang-orang asing yang tinggal di kota Yogyakarta. Selain orang Cina, orang-orang Belanda dan orang Barat lainnya juga banyak yang tinggal di kota ini. Mereka itu adalah para pejabat pemerintah Belanda, para pengusaha perkebunan, atau pengusaha lainnya.¹⁴

Penduduk di Kota Yogyakarta pada akhirnya juga dapat dibedakan atas tiga golongan penduduk, yaitu Golongan Orang Eropa, golongan Orang Asing Timur dan golongan Orang Bumi Putera atau Pribumi. pengusaha perkebunan, pengusaha industri, dan pedagang.

¹⁴ Djoko Suryo, "Penduduk Dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990" dalam Freek Colombijn (eds.). *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 37.

2. Kehidupan Sosial

Inflasi pada tahun 1930 menyebabkan masyarakat Kota Yogyakarta merasakan kehidupan perekonomian yang mengalami stagnasi. Inflasi terjadi bersamaan dengan menurunnya produksi komoditas dan kebutuhan pokok. Kondisi seperti ini menyebabkan harga-harga kebutuhan membung tinggi. Para importir, pedagang telah menjadi kaya, sedangkan buruh upahan, pegawai keraton (abdi dalem), dan pegawai negeri terpukul karena tidak adanya keseimbangan antara kenaikan harga dengan kenaikan upah dan gaji.

3. Permasalahan Sosial

Kriminalitas di Kota Yogyakarta terjadi akibat resesi ekonomi pada tahun 1930 yang dikenal dengan krisis *Malaise*. Pada saat itu banyak pedagang dan perajin di yang mengalami kebangkrutan, karena sebagian besar pembeli potensial produk mereka juga mengalami krisis yang sama.

Kekerasan dan kriminalitas yang pernah terjadi di Kotagede, sebuah pinggiran kota yang berjarak beberapa kilometer disebelah

tenggara pusat Kota Yogyakarta dan tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan sejarah Kota Yogyakarta pada masa akhir kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda.¹⁵ Perampokan terhadap keluarga Kalang di Kotagede terjadi pada masa akhir kolonial. Tindak kriminalitas ini mendorong para penduduk Kotagede melakukan tindakan pengamanan terhadap wilayah mereka.

4. Gaya Hidup

Percampuran budaya Eropa dengan budaya lokal yang meliputi seluruh aspek tujuh unsur universal budaya,¹⁶ menimbulkan budaya baru yang didukung oleh masyarakat pribumi yang disebut dengan budaya Indis. Budaya Indis kemudian ikut

mempengaruhi gaya hidup masyarakat di Kota Yogyakarta. Budaya Indis pada awalnya didukung oleh kebiasaan hidup membujang para pejabat Belanda. Adanya larangan membawa istri (kecuali pejabat tinggi) dan mendatangkan wanita Belanda ke Hindia-Belanda mengakibatkan terjadinya percampuran darah yang melahirkan anak-anak campuran dan menumbuhkan budaya dan gaya hidup Belanda-pribumi yang disebut gaya Indis.¹⁷

C. PENGARUH PERUBAHAN MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN KOTA YOGYAKARTA 1930-1940

1. Pemukiman Penduduk Kota Yogyakarta

Pola penataan tata ruang kota di Kota Yogyakarta identik dengan percampuran kota tradisional dan kota kolonial. Pola ini meliputi Alun-Alun Utara yang merupakan pusat

¹⁵ Baca Bambang Purwanto, *Kekerasan dan Kriminalitas di Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan*, dalam buku *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia* karya Purnawan Basundoro, (Yogyakarta: Ombak 2015), hlm. 199.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 2.

¹⁷ Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis Dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya Di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), hlm. 8.

kota yang dikelilingi oleh beberapa komponen lain diantaranya Masjid Agung disebelah barat, keraton di sebelah selatan dan pasar di sebelah utara. Selain itu, masih ada lagi Alun-Alun Selatan. Inajati Adrisijanti mengungkapkan bahwa kawasan yang memuat keempat komponen itu disebut pusat kehidupan penduduk kota atau “*civic center*”.¹⁸

Kota Yogyakarta termasuk kota kolonial, salah satu ciri utama dari kota kolonial di Hindia Belanda adalah yang membangun kota bagi orang Belanda sehingga bentuk fisiknya disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan selera orang Belanda. Kota Yogyakarta memiliki ciri-ciri yang sekaligus menunjukkan sejarah kota misalnya kawasan kota tradisional dengan pembagian spasial berdasarkan status

¹⁸ Baca Inajati Adrisijanti, *Kota Yogyakarta sebagai Pusaka Budaya Potensi dan Permasalahannya*, dalam Diskusi Sejarah “Kota dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah”, diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 11-12 April 2007 hlm. 4.

sosialnya serta kedudukan pemukiman dengan keraton. Kawasan kota bagi pedagang asing terutama pedagang Cina. Sektor kolonial dengan benteng dan barak. Kawasan kota bagi kelas menengah pribumi dan kawasan kota bagi imigran dari desa. Terdapat pula berbagai fasilitas yang menunjangnya seperti gedung sekolah, tempat beribadah, rumah sakit dan gedung perkantoran.¹⁹

2. Rumah Sakit

a. Rumah Sakit *Zending*

Sebelum akhir 1930-an sebagai dampak depresi ekonomi, manajemen rumah sakit *Zending* menempatkan pelayanan sebagai tujuan utama mereka dibandingkan mencari keuntungan. Pendanaan operasional rumah sakit sangat tergantung pada gereja induknya di Belanda. Selain itu, dana operasional rumah sakit *Zending* diperoleh dari subsidi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Bantuan yang disubsidi dalam bentuk sumbangan, kontribusi

¹⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm.63.

dan upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh yayasan. Bantuan dana operasional juga diperoleh dari pabrik gula, individu, perusahaan rokok dan perusahaan kereta api *Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij* dan pemerintah daerah. Misalnya rumah sakit *Zending* di Kota Yogyakarta yang menerima sumbangan dana sebesar f 250 setiap tahun dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.²⁰

b. Rumah Sakit *Missie*

Titik awal berdirinya Rumah Sakit Panti Rapih adalah dibentuknya yayasan "*Onder de Bogen*" atau dalam bahasa Belanda *Onder de Bogen Stichting* oleh pengurus Gereja Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 1927. Tanda pembangunan fisik rumah sakit dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Ny. C.T.M. Schmutzer van Rijkevorsele tanggal 14 September 1928. Misionaris Katolik membangun rumah sakit dengan tujuan yang sama dengan *Zending*. Rumah Sakit *Missie* yang di bangun di Kota

Yogyakarta yaitu Rumah Sakit Panti Rapih. Rumah Sakit Panti Rapih pada awalnya didirikan oleh perusahaan gula pada tahun 1928 dengan nama Rumah Sakit *Onder de Bogen*.²¹

Rumah Sakit Panti Rapih dirancang oleh Ghijssels untuk misi Katolik.²² Bangunan yang dihiasi dengan lengkungan-lengkungan dan nama *Onder de Bogen* menjadikan kelengkapan nostalgia bagi para Suster CB yang berdinasi di rumah sakit ini akan induk biara Suster-Suster CB di Maastricht Belanda.

c. Rumah Sakit Muhammadiyah

Organisasi keagamaan Muhammadiyah mendirikan Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) di Kota Yogyakarta. Pertama kali didirikan pada 1923. Tujuan rumah sakit ini memberikan layanan kesehatan untuk penduduk

²¹ Baha'uddin, "Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Masa Kolonial", Lembar Sejarah, Vol.2, No.2, 2000, hlm. 103-123.

²² Handinoto, *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*, (Yogyakarta:, Graha Ilmu, 2012), hlm. 68

²⁰ Sri Margana & M. Nursam, *op.cit.*, hlm. 172.

pribumi.²³ Pada tahun 1923 menjadi awal perkembangan dari PKO Muhammadiyah karena berhasil menyusun aturan dasar yang diberi nama *Qa'idah Moehammadijah Bahagian Penolong Kesengsaraan Omoem*.²⁴

Banyak rumah sakit pemerintah yang dibangun bersama dengan perusahaan. Akan tetapi tidak semua buruh dapat merasakan fasilitas yang di bangun oleh pemerintah mereka harus memperoleh rekomendasi dari *landwedge*.²⁵ Pertimbangan untung rugi pun harus tetap dilakukan oleh pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan mengenai

²³ Sri Margana & M. Nursam, *op.cit.*, hlm. 168.

²⁴ Muhammad Kastolani A.M, *Sejarah RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta*, (Yogyakarta: RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hlm. 81.

²⁵ Baha'uddin, "*Perubahan dan Keberlanjutan: Pelayanan Kesehatan Swasta di Jawa Sejak Kolonial sampai Pasca Kemerdekaan*", Kota-kota di Jawa. (ed) Sri Margana & M. Nursam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 164.

kesehatan para pegawainya. Selain pemotongan gaji makanan yang didapat buruh selama dirawat dirumah sakit juga dianggap hutang yang harus dibayar pada saat menerima upah. Kondisi tersebut tentu saja menjadikan semakin tertindasnya masyarakat kelas bawah di Era Politik Etis.

Ketidakmampuan pemerintah menjamah seluruh lapisan masyarakat dalam penerapan politik etis memberi peluang bagi misi *zending* dan misionaris untuk menyebarkan agamanya. Rumah sakit dan sekolah dibangun dengan tujuan untuk memikat masyarakat pribumi agar mau mengikuti ajaran yang mereka ajarkan. Bahkan para tenaga medis yang dibawa *Zending* sudah dipersiapkan untuk menyebarkan agama Kristen di Kota Yogyakarta.²⁶

3. Sekolah

Menurut data tahun 1924, Yayasan Sekolah Netral mempunyai ELS di Jalan Pakem, Sekolah Frobel di *Loge Mataram* dan *Hollandsch-Javaansche School* (satu untuk laki-

²⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

laki dan satu untuk perempuan) di Jalan Malioboro. Jumlah guru bangsa Eropa 17 orang dan 7 pribumi sedangkan muridnya ada 217 Eropa dan 512 pribumi. Gambaran mengenai perimbangan sekolah swasta dan pemerintah tampak jelas berdasarkan data statistik sekolah di ibukota Yogyakarta tertanggal 31 Desember 1924. Dari 70 sekolah yang terdapat di Yogyakarta, 30 sekolah adalah kepunyaan pemerintah, 7 sekolah Katolik, 9 sekolah netral, 9 sekolah Protestan, 6 sekolah Muhammadiyah, 2 sekolah Budi Utomo, 1 sekolah Taman Siswa, 2 sekolah Adhidharmo, 2 sekolah Cina dan 3 sekolah Islam lainnya (diselenggarakan masing-masing oleh 3 organisasi Islam yaitu Takwimudin, Sumarah Allah, dan Ikhwanul Muslimin.²⁷

4. Jaringan Transportasi

Andong pada masa pemerintahan kolonial Belanda dianggap sebagai alat transportasi. Andong mempergunakan tenaga

hewan yaitu kuda sebagai tenaga atau mesin yang menggerakkan keretanya. Andong dikemudikan oleh seorang kusir yang memakai pakai tradisional Jawa disebut dengan nama Surjan dan memakai topi tradisional Jawa yang disebut blangkon, biasanya mereka membawa pecut atau cemeti yang digunakan untuk mengendalikan kuda saat sedang menjalankan andong. Selain itu kereta andong yang memiliki lampu yang berbentuk khas dan antik di sisi kiri dan kanan.²⁸

Transportasi di Kota Yogyakarta didominasi oleh angkutan darat yang digunakan untuk pengangkutan barang. Alat transportasi seperti kuda beban, gerobak, dan kereta kuda. Kemudian transportasi mulai dilengkapi dengan mobil sewaan, prahoto dan bus.²⁹ Modernisasi

²⁸ Woro Hutami Pramudya Hastiwi, *Andong di Yogyakarta (Studi Dampak Ikon Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kusir Andong Malioboro)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), hlm 3-4.

²⁹ Anton Haryono, *Usaha Kecil Berspektrum Luas: Industri Pribumi di Daerah Yogyakarta 1830-1930'an*, diakses dari

²⁷ *Gegeven over Djokjakarta, 1925. 1925. 125-131.*

kendaraan telah ada di Kota Yogyakarta, kereta pos (untuk penumpang) ditarik empat ekor kuda. Pengendali kudanya berseragam pelayan pengiring yang dipengaruhi gaya Eropa. Seorang pelayan di Jawa tidak akan pernah duduk lebih tinggi daripada majikannya yang bangsawan.³⁰

Sejak tahun 1935, di rumah sakit Petronella telah menyediakan sebuah kereta kuda sebagai alat transportasi bidan untuk melayani persalinan di rumah-rumah penduduk. Pada awalnya dokter Pruys masih melakukan perjalanan dengan mengendarai sebuah *Bendi*³¹ yang ditarik oleh seekor kuda dengan seorang *sais*³² untuk mengunjungi

<https://www.usd.ac.id>, pada Senin, 11 Februari 2019, pukul 16.24 WIB, hlm. 5.

³⁰ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 109.

³¹ Bendi merupakan kendaraan tradisional yang ditarik oleh seekor kuda, serupa dengan Andong atau Delman, tetapi hanya menggunakan dua buah roda sebagai penumpang.

pasien-pasien yang ada di luar rumah sakit.

KESIMPULAN

Kota Yogyakarta merupakan kota dengan lintasan sejarah yang cukup panjang, dimulai dari perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, dan dalam perjalanan sejarahnya kemudian menjadi sebuah kota dengan berbagai perkembangannya. Proses penyesuaian beberapa kelompok penduduk kerajaan dalam situasi akhir kolonial. Dalam proses ini terjadi kontak kultural antara kekuatan tradisional dengan kekuatan kolonial. Kota tradisional merupakan salah satu sektor dalam kota.

Keberadaan berbagai etnis yang tinggal di Kota Yogyakarta turut memberi warna dalam arah

³² Sais atau yang sering disebut dengan istilah kusir merupakan profesi seseorang yang bekerja sebagai pengendali kuda yang menjadi tenaga penarik kendaraan tradisional.

perkembangan kota. Perkembangan pemukiman Eropa, pemukiman Cina dan Arab, dan pemukiman pribumi di Kota Yogyakarta semakin meningkat. Pemukiman Eropa seperti Kotabaru, Jetis dan Bintaran menjadi wilayah yang berkembang pesat. Masyarakat Eropa kemudian berkembang ke daerah Kotabaru sedangkan pemukiman orang Cina bergerak ke arah utara yaitu daerah Kranggan.

Keberadaan orang Eropa yang bekerja sebagai pegawai pemerintah maupun dalam dinas sipil menyebabkan semakin banyak orang Eropa yang tinggal di Kota Yogyakarta. Pembangunan fasilitas perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya digunakan untuk kebutuhan orang Eropa di Kota Yogyakarta. Orang pribumi terbatas dalam akses dari pembuatan fasilitas tersebut, hanya golongan tertentu seperti kelas bangsawan atau aristokrat. Sedangkan orang Cina dan Arab kebanyakan sebagai pedagang di Kota Yogyakarta.

Perubahan sosial telah menjadi salah satu faktor penting dalam membawa perkembangan tata Kota

Yogyakarta tahun 1920-1940. Perubahan sosial berdampak di bidang administrasi pemerintahan, perekonomian, fasilitas ibadah, jaringan transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas olahraga dan hiburan mengubah wajah kota Yogyakarta pada akhir masa Kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi:

BPAD DIY, *Arsip Salinan Rijksblad van Kasultanan Tahun 1930, Undang-Undang Papatih Dalem, tanggal 28 Juni 1930 Angka 17/1 H tentang Pencacahan Penduduk.*

BPAD DIY, *Peraturan Pemerintah Kasultanan 5 April 1920 No.5/I tentang Amandemen dan Penambahan Peraturan Reorganisasi Administrasi di dalam Kabupaten Kota Yogyakarta*

Gegevens over Djokjakarta. 1925: 125-131.

Buku-Buku dan Artikel:

Abdurrachman Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis Dan Gaya Hidup Masyarakat*

- Pendukungnya Di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Djunhur H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: Ilmu, 1976.
- Fadly Rahman, *Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942*, Jakarta: Kompas 2011.
- Freek Colombijn (dkk), *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Handinoto, *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Larson, George D, *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, terj. A. B. Lopian, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Nur Aini Setiawati, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan dan Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi Tahun 1917*, Yogyakarta: STPN Press, 2011.
- Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Reggie Baay, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Ricklefs, M. C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Riyadi Goenawan & Darto Harnoko, *Mobilitas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Awal Abad Ke-20: Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Yogyakarta, Ombak, 2012.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Terjemahan Mochtar Pabotinggi, Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Sri Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sri Margana & M. Nursam, *Kota-Kota di Jawa Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Suhartono W. Pranoto, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Yogyakarta: Ilmu Sejarah UNY, 2013.
- Wertheim, W. F. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.